

RINGKASAN

Lala Anjani **Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana**
220510240 **Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur**
 (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Jkt.Sel)

(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan Tasyukur, S.H., M.H.)

Anak memiliki kedudukan hukum khusus yang dilindungi undang-undang. Perlindungan diberikan karena kondisi psikologis dan sosial anak yang belum matang membuat anak rentan terlibat tindak pidana penganiayaan, dan pertanggungjawaban pidananya diatur khusus melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel, hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan bahwa anak sebelumnya merupakan korban eksploitasi seksual, padahal hukum secara tegas melarang eksploitasi seksual terhadap anak tanpa atau dengan persetujuan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel dipengaruhi oleh faktor keluarga, usia, dan psikologis dan hukuman pidana penjara Anak selama 3,5 tahun dinilai tidak sesuai, karena Anak dapat ditempatkan di LPKS atau dengan hukuman yang lebih ringan. Pertimbangan hakim dalam menilai hubungan seksual antara Anak dan Anak Korban bukan paksaan hanya karena tidak ada gejala trauma kurang tepat, karena Anak sebagai anak di bawah umur secara hukum tidak memiliki kecakapan untuk memberikan persetujuan atas hubungan seksual. Dengan demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Disarankan agar hakim melakukan pemeriksaan psikologis dan sosial sebelum menjatuhkan sanksi kepada anak, serta memperkuat penerapan prinsip *ultimum remedium* melalui alternatif non-pemidanaan seperti penempatan di LPKS. Hakim diharapkan lebih cermat dalam menerapkan prinsip perlindungan anak, baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban kejahatan seksual, agar hak perlindungan dan pemulihan Anak sebagai korban terpenuhi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Tindak Pidana Penganiayaan.*

SUMMARY

Lala Anjani 220510240 Analysis of Criminal Liability for the Crime of Assault Committed by a Minor (A Study of Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Sel)

(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. and Tasyukur, S.H., M.H.)

Children have a special legal status protected by law. Such protection is provided because their psychological and social development is not yet fully mature, making them vulnerable to involvement in criminal acts, including assault. Criminal liability for children is specifically regulated under the Juvenile Criminal Justice System Law, which prioritizes restorative justice and the best interests of the child. However, in Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel, the court imposed a term of imprisonment without considering that the child had previously been a victim of sexual exploitation, even though Indonesian law expressly prohibits the sexual exploitation of children regardless of whether the child gives consent.

This study aims to examine the form of criminal liability for the assault committed by the child and to analyze the judge's legal reasoning in Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel. This research employs a normative juridical method using both a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of secondary legal sources. The study is descriptive in nature and applies qualitative legal analysis.

The findings indicate that the assault committed by the child in Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel was influenced by family, age, and psychological factors. The sentence of three and a half years' imprisonment is considered inappropriate because the child could have been placed in a Child Social Welfare Institution LPKS or subjected to a lighter sanction. Furthermore, the judge's consideration that the sexual relationship between the child and the child victim was not coercive solely because there were no signs of psychological trauma is legally flawed. As a minor, the child does not have the legal capacity to give valid consent to sexual activity. Therefore, the decision does not fully reflect the principles of child protection and the best interests of the child.

This study recommends that judges conduct comprehensive psychological and social assessments before imposing sanctions on children and strengthen the application of the ultimum remedium principle by prioritizing non-custodial alternatives, such as placement in an LPKS. Judges are also expected to apply child protection principles more carefully to children in conflict with the law as well as children who are victims of sexual crimes, thereby ensuring the fulfillment of their rights to protection and recovery.

Keywords: Criminal Accountability, Children, Criminal Abuse.